

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH MASA  
PANDEMI (Studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang  
Bawang Barat)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Rokiah  
NPM 1716021004**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH MASA PANDEMI (Studi Kasus di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**Oleh**

**ROKIAH**

Penelitian ini dilatarbelakangi di masa pandemi COVID-19 telah merubah pola pendidikan di daerah. SMP N 1 Tulang Bawang Udik menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai efektivitas kebijakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi (Studi Kasus di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat). Berdasarkan teori William N. Dunn terdapat lima indikator efektivitas kebijakan, yakni 1. efisiensi, 2. kecukupan, 3. pemerataan, 4. responsivitas, 5. ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 nilai yang terpenuhi pertama indikator kecukupan, adanya pemberian paket data internet dari pemerintah pusat dan fasilitas wifi dari sekolah untuk siswa-siswa kalau diperlukan untuk pembelajaran sudah efektif. Kedua indikator pemerataan, pelaksanaan kebijakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi sudah efektif. Ketiga indikator ketepatan, kebijakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat) ini sudah efektif agar mencegah penularan virus covid-19 sehingga proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan tetap berjalan dengan semestinya. Namun terdapat 2 nilai yang belum terpenuhi pertama indikator efisiensi, biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Kedua responsivitas, mendapatkan tanggapan yang negatif dari siswa.

Kata kunci : Efektivitas, Kebijakan, Pembelajaran Jarak Jauh

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECTIVENESS OF DISTANCE LEARNING POLICY DURING PANDEMIC (Case Study at SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Barat Regency)**

**By**

**ROKIAH**

This research is motivated during the COVID-19 pandemic, which has changed the pattern of education in the regions. SMP N 1 Tulang Bawang Udik implements a distance learning policy (PJJ). This study aims to discuss the effectiveness of distance learning policies during the pandemic (Case Study at SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Barat Regency). Based on William N. Dunn's theory, there are five indicators of policy effectiveness, namely 1. efficiency, 2. adequacy, 3. smoothing, 4. responsiveness, 5. accuracy. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The results showed that there were 3 values that were met, the first was the adequacy indicator, the provision of internet data packages from the central government and wifi facilities from schools for students if needed for effective learning. The two indicators of equity, the implementation of distance learning policies during the pandemic have been effective. The three indicators of accuracy, the distance learning policy during the pandemic at SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Barat Regency) has been effective in preventing the transmission of the covid-19 virus so that the teaching and learning process in education continues to run properly. However, there are 2 values that have not been met, the first is the efficiency indicator, the costs incurred through the policy process are too large compared to the results achieved. The second is responsiveness, getting negative responses from students.

**Keywords :** Effectiveness, Policy, Distance Learning

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH MASA  
PANDEMI (Studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang  
Bawang Barat)**

**Oleh**

**Rokiah**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
LAMPUNG  
2021**

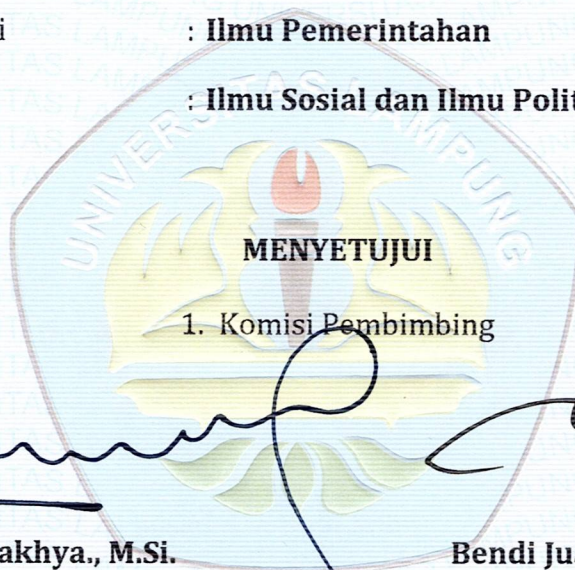
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBELAJARAN  
JARAK JAUH MASA PANDEMI  
(Studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik,  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Nama Mahasiswa : **Rokiah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716021004**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

**Dr. Syarief Makhya., M.Si.**  
NIP. 19590803 198603 1 003

**Bendi Juntara, S.IP., M.A.**  
NIP. 19880923 201903 1 011

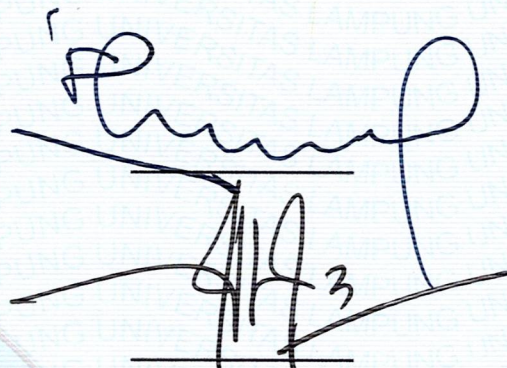
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

  
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP. 19611218 198902 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Syarief Makhya, M.Si.**



Sekretaris : **Bendi Juantara, S.IP., M.A.**

Penguji : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 November 2021**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 01 Desember 2021  
Yang Membuat Pernyataan



Rokiah  
NPM. 1716021004

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rokiah, anak kedelapan dari 8 (delapan) bersaudara. Dilahirkan di Karta pada tanggal 10 Juni 1998 dari pasangan Bapak Basyuni Fajar (Alm) dan Ibu Rosmanila. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tingkat sekolah dasar (SD) yaitu SDN 2 Karta pada tahun 2005 dan lulus di tahun 2011. Pendidikan menengah pertama, penulis selesaikan di SMPN 2 Tulang Bawang Udik pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 1 Tumijajar pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017.

Tahun 2017 penulis sangat bersyukur dinyatakan lulus pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis juga merupakan salah satu mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi. Selama menjalani perkuliahan penulis mengikuti organisasi kampus yaitu FSPI FISIP Unila.

Penulis melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada bulan Januari dan Februari 2020 melalui kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 40 hari di desa Wira Agung Sari Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian pada bulan juli 2020 Penulis melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) selama 30 hari di KPU Provinsi Lampung.



## **MOTTO**

“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis”

**(Aristoteles)**

*“Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”*

**(QS. Al-An'am Ayat 59)**

“Gapailah impianmu setinggi langit, karena hidup hanya sekali”

**(Rokiah)**

“Segala sesuatu itu butuh perjuangan”

**(Rokiah)**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhlar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Segala ketulusan hati, aku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

“Ayah dan Ibuku Tercinta”

**Basyuni Fajar(Alm) dan Rosmanila**

Terima Kasih yang tak terhingga kepada ibuku karena telah sabar dan ikhlas membesarkanku, mendidik, mendoakan, dan memberikan kasih sayang serta dukungan yang tiada hentinya. Terima Kasih kepada ayahku yang telah mendoakanku dari alam surga dan semoga ayah selalu diberikan pertolongan di surga, amin.

“Kakak-kakakku Tersayang”

**Listari, Beta Diana, Ansori, Desma Linda, India Jaya, Soresta, Dan Muhammad Wasis**

Terima kasih atas segala do'a, dukungan dan kasih sayang yang kalian berikan.

Terima kasih untuk seluruh dosen, staff dan teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Efektivitas Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi (Studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan yang penuli miliki.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku pembimbing utama sekaligus sebagai dosen Pembimbing Akademik peneliti yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya
5. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A. selaku pembimbing kedua peneliti.  
Terima kasih atas segala bimbingannya dan yang telah memberikan motivasi, masukan, kritik, saran, sehingga peneliti mampu menyelesaikan sampai tahap akhir skripsi ini

6. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S. Sos, M.IP. selaku dosen penguji. Suatu kebanggaan dapat diuji oleh beliau, terima kasih telah memberikan kritik saran yang luar biasa dan sangat membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meskipun tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat peneliti kepada bapak ibu semua. Peneliti sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah menjadi seseorang yang berpengaruh bagi peneliti untuk menuntut ilmu pengetahuan
8. Seluruh satuan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan sekolah SMP N 1 Tulang Bawang Udik yang telah bersedia menjadi informan, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga Allah membalas kebaikannya
9. Kedua orang tua tercinta, Mamah Rosmanila, Papah Basyuni Fajar (Alm) yang tidak pernah lupa mendoakan anaknya (peneliti) dalam menyelesaikan penelitian ini. Serta senantiasa berjuang keras untuk menjadikan penulis sebagai insan berpendidikan tinggi. Semoga dari ilmu yang penulis dapatkan dapat bermanfaat bagi banyak orang dalam menjadi amal jariyah yang akan selalu mengalir kepada Papah dan Mamah tercinta
10. Kakak-kakak tercinta Listari, Beta Diana, Ansori, Desma Linda, India Jaya, Soresta, Dan Muhammad Wasis semoga kalian menjadi orang yang akan terus berjuang meraih kebermanfaatan serta saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan semangat selama kuliah

11. Keluarga besar saya di Tulang Bawang Barat, bibi, paman, sepupu, dan ponakan. Terimakasih sudah memberikan do'a, motivasi, dan nasihat untuk menyelesaikan perkuliahan ini
12. Teman dari Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Reguler A, B, dan Paralel, yang sudah memberikan banyak momen indah selama kuliah dan akan menjadi kenangan yang tak terlupakan
13. Teman-teman Seleting Mak Sekacing yang telah memberikan momen-momen tak terlupakan semasa menjalani perkuliahan di Bandar Lampung, semoga kita selalu kompak sampai kakek nenek
14. Sahabat-sahabat saya Gajebo : Ria Jayanti, Laras Sari, Siti Nurhalimah, Tensi dan Defi Yustika, terima kasih telah menemani selama perjuangan meraih gelar S.IP.
15. Sahabat saya Ria Jayanti terima kasih telah menjadi tempat terbaik dalam keadaan susah maupun senang. Semoga semua urusan dan semua impiannya dapat terwujud dan dimudahkan selalu dan semoga silaturahmi ini tetap terjaga
16. Sahabat-sahabat saya sejak SMA Erita Asih Astini, Anadaa Nabilah Firdaus, Dea Karin Pradipta, Ais Firadilah, dan Amalia Sari yang selama ini sudah banyak membantu dan memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga persahabatan ini terus terjalin
17. Sahabat saya nada terima kasih untuk selama ini telah banyak memberikan masukan, motivasi serta semangat. Semoga persahabatan kita akan terjalin sampai nanti
18. Sahabat saya eritul dan ayu mutia terima kasih telah menemani dan memberikan semangat serta masukan. Sekali lagi terima kasih karena

selama ini sudah menjadi tempat berkeluh kesah dalam proses menyelesaikan skripsi

19. Sahabat saya Fitri Isnaini Sulam terima kasih telah menemani sejak SMA hingga kuliah, terima kasih telah mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya

20. Sepupu-sepupu saya yang sangat saya sayangi Adi Sopyan S.IP., Jonki Irawan S.Pd., Iwan Setiawan S.Pd., terima kasih telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi.

Bandar Lampung, 23 November 2021

Rokiah

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Konsep dan Ukuran Efektivitas.....	11
2.2 Kebijakan Publik .....	20
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	20
2.2.2 Ciri-Ciri Kebijakan .....	22
2.2.3 Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik.....	24
2.3 Analisis Kebijakan Publik .....	27
2.4 Pembelajaran Jarak Jauh.....	33
2.5 Kerangka Pikir.....	34
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian .....	39
3.2 Lokasi Penelitian .....	39
3.3 Fokus Penelitian .....	40

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	41
3.4.1 Data Primer .....	41
3.4.2 Data Sekunder.....	42
3.5 Penentuan Informan .....	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.7 Teknik Pengolahan Data .....	45
3.8 Teknik Analisis Data .....	46
3.9 Verifikasi Data/Kesimpulan .....	47
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	48
4.2 Gambaran Umum SMPN 1 Tulang Bawang Udik.....	50
4.2.1 Sejarah Berdirinya SMPN 1 Tulang Bawang Udik.....	50
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
5.1 Deskripsi Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh.....	52
5.2 Efektivitas Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh.....	54
5.2.1 Efisiensi.....	74
5.2.2 Kecukupan .....	79
5.2.3 Pemerataan.....	84
5.2.4 Responsivitas .....	89
5.2.5 Ketepatan .....	93
5.3 Analisis Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh.....	96
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>100</b>
6.1 Kesimpulan.....	100
6.2 Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>105</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Data Konfirmasi COVID-19 Provinsi Lampung.....	2
2. Kerangka Pikir.....	37
3. Data Subsidi Kuota Internet.....	75
4. Rekapitulasi Data Anggaran PJJ.....	76

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu.....	7
2. Daftar Informan.....	42
3. Data Perubahan Nama Sekolah.....	50

## DAFTAR SINGKATAN

COVID-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>
HP	: Hand Phone
KBM	: Kegiatan Belajar Mengajar
KKM	: Kriteria Ketuntasan Minimal
PJJ	: Pembelajaran Jarak Jauh
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
WA	: WhatsApp

## I. PENDAHULUAN

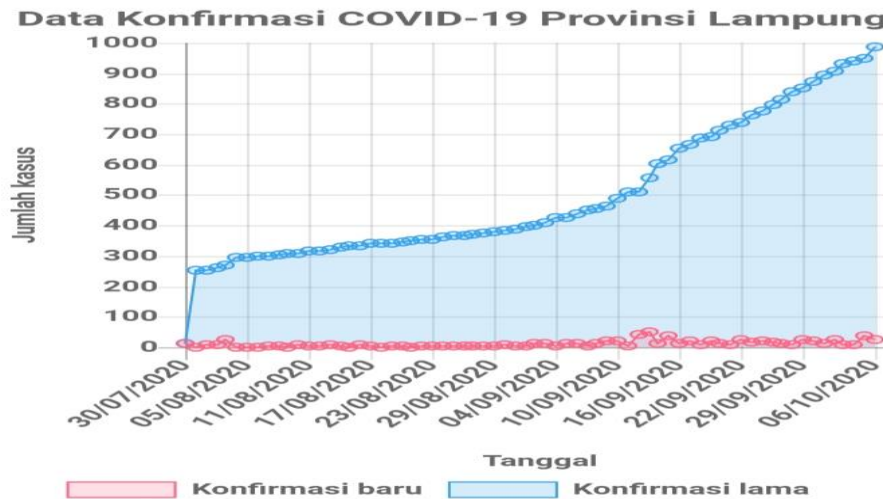
### 1.1. Latar Belakang

Awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat. *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari (Yurianto, 2020). Badan Kesehatan Dunia / *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Perkembangan penyebaran yang sangat cepat meluas tersebut membuat WHO menyatakan COVID-19 sebagai Pandemi (Wiratmo, 2020).

Menurut data Kementerian Kesehatan, sebanyak 215 negara sudah terjangkit COVID-19 tak terkecuali Indonesia. Tercatat per tanggal 8 Oktober 2020, berdasarkan data Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, COVID-19 telah merenggut nyawa 1.051.753 orang dan menginfeksi 35.958.084 orang di seluruh dunia (JHCRC, 2020). Kasus COVID-19 di Indonesia terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang (Dwi et al., 2020). Tercatat per tanggal 8

Oktober 2020, berdasarkan data Badan Nasional Penanganan Bencana melalui Gugus Tugas Penanganan COVID-19, tercatat sebanyak 11.472 orang meninggal dunia dan 315.714 terkonfirmasi positif (BNPB, 2020).

**Gambar 1. Data Konfirmasi COVID-19 Provinsi Lampung**



Sumber : Dinkes.lampungprov. (2020). Data Pemantauan COVID-19 Provinsi Lampung 20-Mar-2020 sampai 06-Oct-2020.

Jika melihat grafik yang terus meningkat, tidak dapat dipastikan kapan wabah korona ini akan berakhir. Menurut RL. 14/09/2020 penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Lampung dua hari naik tajam pada bulan oktober 2020. Sampai saat ini, Per 7 Oktober 2020 terdapat 1031 kasus dan 38 kematian di Lampung (dinkes.lampungprov).

Pandemi COVID-19 berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia (MENKES 2020). Menurut kompas, 28/03/2020 dampak pandemi COVID-19 tidak hanya sebatas pada aspek sosial tetapi juga terjadi di dunia pendidikan. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan pencegahan virus corona, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing*. Menurut *Center for Disease (CDC) Social Distancing* yaitu menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal, dan menjaga jarak antar manusia. Pembatasan

sosial/menjaga jarak yang dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 agar tidak menyebar luas di Negara Indonesia. *Social Distancing* sangat berpengaruh untuk menghambat penyebaran COVID-19. Kebijakan ini diberlakukan secara nasional sehingga tidak hanya berdampak pada daerah-daerah yang terpapar, namun juga di seluruh daerah-daerah yang belum terdampak (Ahmad, 2020).

Kebijakan tersebut juga telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dengan dikeluarkannya beberapa surat edaran terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Pertama, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Kemendikbud. Kedua, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan. Ketiga, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19). Langkah tersebut dilakukan untuk menekan dan meminimalisir angka pasien yang terpapar virus (Kemendikbud RI, 2020).

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana yang telah disebutkan, berisikan ketentuan tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat, beberapa poin ketentuan tersebut adalah; pertama, pembatalan Ujian Nasional tahun 2020. Kedua, pelaksanaan proses belajar yang dilakukan di rumah. Ketiga, ketentuan Ujian Sekolah untuk kelulusan. Keempat, ketentuan kenaikan kelas. Kelima, ketentuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Keenam, tentang penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan. Di dalam surat tersebut dimuat 6 poin yang salah satunya berupa himbuan untuk mengubah pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran berbasis daring. Kebijakan pembelajaran ini

dilaksanakan oleh jenjang pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi.

Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19), Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Umar Ahmad mengeluarkan Surat Edaran Bupati Tulang Bawang Barat Nomor: 443/01/II.01/TUBABA/2020 Tentang Upaya Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Umar Ahmad, sebagaimana yang telah disebutkan, berisikan ketentuan tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat, beberapa poin ketentuan tersebut adalah :

Dalam upaya pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada satuan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka segera lakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk dapat dilakukan di rumah sejak tanggal 17 Maret s.d 29 Maret 2020.
- 2) Menjadwalkan Guru untuk melakukan Piket agar kebersihan lingkungan sekolah terjaga.
- 3) Dilarang melakukan kegiatan / berpergian ke luar daerah (berlibur).
- 4) Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Peserta Didik agar tetap melakukan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), rajin mencuci tangan, makan makanan yang sehat dan bergizi, serta rutin berolahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
- 5) Jika terjadi gejala atau gangguan kesehatan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat.
- 6) Tingkatkan ibadah sesuai dengan keimanan dan ajaran Agama masing-masing.

Dalam surat tersebut Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk dapat dilakukan dirumah. Artinya yang sebelumnya proses belajar mengajar dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan dikeluarkan Kebijakan Pencegahan COVID-19 maka proses belajar mengajar menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

SMP N 1 Tulang Bawang Udik merupakan salah satu sekolah negeri berakreditasi A (sekolah yang menjadi acuan atau disebut sekolah favorit) yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sigap dan siap menerapkan Pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada para peserta didiknya. Setelah ada keputusan dari Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, SMP N 1 Tulang Bawang Udik langsung membuat rambu-rambu serta apa saja materi yang akan diberikan untuk melaksanakan Pembelajaran jarak jauh.

Konsep dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang lebih dikenal dengan istilah *distance learning* atau *distance education*, yaitu suatu sistem pendidikan di mana terdapat pemisahan antara pengajar dan siswa baik secara ruang dan/atau waktu (Syah, 2020). Sistem pembelajaran pada dasarnya merupakan cara-cara untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu tercapainya hasil belajar secara maksimal oleh peserta didik dalam kegiatan belajar. Hasil belajar merupakan faktor penting dalam proses belajar mengajar.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan guru dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai berikut:

1. Keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa, kondisi yang ada di Indonesia tidak seluruhnya paham penggunaan teknologi, begiitu juga dengan siswa yang memiliki kondisi yang sama sehingga terjadinya keterbatasan dan terhambatnya penggunaan teknologi



2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berbeda-beda dan adanya kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan pada guru dan siswa mengakibatkan terbatasnya akses untuk menikmati sarana dan prasarana teknologi informasi yang sangat dibutuhkan dalam masa pandemi COVID-19
3. Akses internet yang terbatas, jaringan internet masih belum merata di setiap daerah di Indonesia, khususnya di pelosok negeri. Kondisi jaringan yang sangat memprihatinkan membuat kendala akses internet ini sebagai penghalang siswa dan guru untuk melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
4. Kurang siapnya penyediaan anggaran, dalam penggunaan kuota internet untuk memenuhi kebutuhan dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di mana kesejahteraan perekonomian yang masih jauh dari harapan sehingga tidak sanggup untuk pembelian kuota (Baharin et al., 2020).

Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk keseluruhan program pembelajaran merupakan hal baru bagi semua pihak yang berkepentingan: pengajar, peserta didik dan manajemen pengelola pendidikan. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mewajibkan seluruh siswa untuk mempelajari materi dengan bimbingan yang dilakukan dengan daring, tak terkecuali dengan materi praktik. Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan salah satu kebijakan pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti saat ini. Penelitian terdahulu tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Pembahasan
1	Widia Novita Lukitasari.Wa, 2019, Skripsi Universitas Lampung	Efektivitas Kebijakan Tata Niaga Beras Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani (Studi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017)	faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 antara lain kejelasan tujuan program, sasaran program dan unit kerja sudah efektif sesuai dengan Teori Efektifitas Kebijakan dari Dunn (2003:610).
2	Armino Febriansyah, 2017, Skripsi Universitas Lampung	Efektivitas Kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah Dalam Mengembangkan Potensi Seni Tari Adat Lampung Pepadun	kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi seni tari adat Lampung Pepadun sudah efektif sesuai dengan indikator menurut Dunn yaitu berupa efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.
3	Deo Vita Effendi, 2015, Skripsi Universitas Lampung	Efektivitas Kebijakan Sistem Alih Daya <i>Outsourcing</i> di PT Centralpertiwi Bahari	kebijakan sistem <i>outsourcing</i> di PT Central pertiwi Bahari belum efektif. Dalam pelaksanaannya PT Centralpertiwi Bahari masih

			banyak kekurangan salah satunya dalam hal pengawasan atas pemenuhan syarat-syarat <i>outsourcing</i> yang sangat sulit dilakukan.
--	--	--	---

Sumber : Diolah oleh peneliti 2020

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pertama adalah penelitian ini menitik beratkan kepada bagaimana Efektivitas Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi (Studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat) Sedangkan penelitian terdahulu yang pertama menitik beratkan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu kedua adalah penelitian terdahulu kedua meneliti kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi seni tari adat Lampung Pepadun, sedangkan penelitian ini meneliti tentang Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi (Studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ketiga adalah penelitian ketiga meneliti tentang kebijakan sistem *outsourcing* di PT Central pertiwi Bahari, hal ini berbeda dengan penelitian ini karna penelitian ini meneliti tentang bagaimana Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi (Studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat) sudah efektif atau belum.

Berdasarkan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan guru dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka peneliti ingin melihat sejauh mana Efektivitas Kebijakan Pembelajaran

Jarak Jauh Masa Pandemi (Studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat), dengan alasan kebijakan Pembelajaran jarak jauh saat ini sedang berlaku sehingga perlu dilakukan penelitian yang dapat dijadikan sebagai analisis dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi regulator untuk memutuskan apakah kebijakan pembelajaran jarak jauh akan tetap diberlakukan atau tidak.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas kebijakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi (Studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat)?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi (Studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat).

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan akademis, sumber wawasan dan sebagai bahan masukan bagi seluruh elemen masyarakat, birokrat dan politik. Tidak hanya itu saja tetapi juga untuk perkembangan ilmu politik dan ilmu pemerintahan, yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan publik, khususnya pada kebijakan pembelajaran jarak jauh pada satuan pendidikan.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan dan rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengambil keputusan untuk membuat kebijakan. Terutama bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan pembelajaran jarak jauh harus mempertimbangkan baik dan buruk dari segala aspek kehidupan, apakah kebijakan tersebut layak untuk diimplementasikan. Manfaat bagi penyelenggara sekolah adalah agar para penyelenggara sekolah tidak lagi diberatkan dengan adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh yang mempunyai dampak negatif. Manfaat bagi peserta didik adalah agar peserta didik lebih nyaman dalam menjalankan pendidikan yang akan berpengaruh kepada prestasi belajar. Sedangkan manfaat bagi masyarakat adalah masyarakat dapat menerima dampak yang positif. Masyarakat tidak diberatkan tuntutan dari anak mereka sebagai siswa.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Konsep dan Ukuran Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Gedeian (dalam Febriansyah, 2017:12) mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent to which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar pada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Menurut Dunn (2006:429) menyatakan bahwa: Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut

Mahmudi (dalam Widia Novita Lukitasari. WA, 2019) mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka untuk menilai efektifitas diperlukan suatu ukuran sebagai suatu standar akan terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Terdapat beberapa ukuran untuk menilai efektifitas atau indikator untuk mengukur mengapa suatu kebijakan dapat tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan tersebut.

William N. Dunn (2006:430) menyebutkan beberapa variabel-variabel yang dapat digunakan untuk melihat efektivitas kebijakan dengan menggabungkan macam-macam model tersebut, yaitu:

#### 1. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Adapun menurut Dunn berpendapat bahwa:

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”.

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini

berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

## 2. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan melihat atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

- 1) Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.
- 2) Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
- 3) Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
- 4) Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan



dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

### 3. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun yang dirugikan. Pareto optimum adalah suatu keadaan sosial dimana tidak mungkin membuat satu orang diuntungkan (*better off*) tanpa membuat yang lain dirugikan (*worse off*).
3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria

Kaldor-Hicks: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.

4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan (*worst off*).

Formulasi dari Rawls (1971:58-60) berupaya menyediakan landasan terhadap konsep keadilan, tapi kelemahannya adalah pengabaian pada konflik. Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis cara-cara tersebut tidak dapat menggantikan proses politik, berarti cara-cara di atas tidak dapat dijadikan patokan untuk penilaian dalam kriteria perataan. Berikut menurut Dunn yaitu:

“Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis; dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik”.

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

#### 4. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn (2006:437) mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

#### 5. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dunn (2006:437) menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah:

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut”.

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau

dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Steers dalam Sutrisno (2010:123) juga mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan yaitu:

- a. Optimalisasi tujuan-tujuan, dengan ancangan optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan dikenali bermacam-macam tujuan, meskipun tampaknya sering saling berkaitan. Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan, efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil melakukan pemusatan perhatian pada tujuan-tujuan yang layak dicapai dan optimal.
- b. Perspektif Sistem, yang dimaksud dengan ancangan sistem ialah menggunakan sistem terbuka yaitu pandangan terhadap suatu organisasi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya. Dengan ancangan ini, perhatian lebih diarahkan pada persoalan-persoalan mengenai saling berhubungan, struktur, dan saling ketergantungan satu sama lain. Sistem ini mencakup tiga komponen ialah input, proses dan output. Sebagai sistem, suatu organisasi menerima input dari lingkungannya kemudian memprosesnya dan selanjutnya memberikan output kepada lingkungannya. Tanpa adanya input dari lingkungannya, suatu organisasi akan mati. Demikian juga tidak memberikan output kepada lingkungannya, suatu organisasi akan mati. Jadi efektivitas tidak hanya dilihat dari segi tujuan semata-mata melainkan juga dari segi sistem.
- c. Tekanan pada segi perilaku manusia, ancangan ini digunakan karena atas dasar kenyataan bahwa tiap-tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya.

Menurut Richard Matland dalam Kadji (2015:78) ada beberapa yang perlu dipenuhi dalam hal mengukur dan menilai Efektivitas Kebijakan, yaitu :

a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauhmana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, dan apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dicapai.

b. Ketepatan Pelaksanaan

Implementor kebijakan tidaklah hanya pemerintah, ada 3 yang bisa menjadi pelaksana kebijakan yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, atau implementasi kebijakan yang diswastakan.

c. Ketepatan Target

Ketepatan target berhubungan dengan beberapa hal. Pertama, apakah target atau masyarakat yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak tumpang tindih atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain atau apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target dalam kondisi mendukung atau menolak.

d. Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang menentukan yakni yang pertama lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan, dan yang kedua lingkungan eksternal berisi persepsi publik akan implementasi dari sebuah kebijakan.

Menurut Hutagalung dan Hermawan (2018:43) keberhasilan suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan diawal dengan melihat hasil dari indikator pengukuran efektivitas sebagai berikut:

a. Ketepatan Sasaran Program

Sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah, hendaknya memiliki sasaran yang tepat karena ketepatan sasaran dalam setiap

pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Ketepatan sasaran program bertujuan untuk melihat sejauhmana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi menjadi kunci utama keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan. Melalui proses sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, suatu program akan dengan mudah mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu sosialisasi program harus dilakukan dengan cara yang terencana dan sistematis agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik. Hal ini terjadi karena semakin baik proses sosialisasi dari suatu program maka akan semakin baik pula pemahaman masyarakat akan konsep dan tujuan dari suatu program tersebut.

c. Pencapaian Tujuan Program

Pencapaian tujuan program digunakan untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Pengawasan

Program Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sudah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sebelumnya.

Sedangkan, menurut Duncan (dalam Tangkilisan 2005:141) mengatakan bahwa ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan

Dalam upaya pencapaian tujuan, semua usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu pencapaiannya ditentukan, sasaran yang merupakan target konkrit, dan dasar hukum.

## 2. Integrasi

Integrasi adalah suatu pengukuran terhadap kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsesus antara anggota kelompok atau masyarakat mengenai nilai-nilai tertentu. Integrasi sangat berkaitan dengan proses sosialisasi. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu prosedur dan proses sosialisasi.

## 3. Adaptasi

Adaptasi adalah pengukuran organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Organisasi yang baik adalah organisasi yang dinamis, yang dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Adaptasi berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana.

## 2.2. Kebijakan Publik

### 2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *policy* yang dibedakan dari kata *wisdom* yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku dari organisasi pemerintah. Menurut pendapat Sirait (1991:115) kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan penyederhanaan sistem yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting.

Dunn (2003:132) menyebutkan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Kebijakan

publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan dapat dilakukan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Edward III dan Sharkansky (dalam Widodo, 2001:190) mengemukakan kebijakan publik adalah *What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of government programs*. (apa yang dikatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah). Pendapat Edward III dan Sharkansky (dalam Budiardjo, 2000:56) mengisyaratkan adanya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Miriam Budiardjo (2000:56) mengemukakan pengertian kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik yaitu pemerintah. Keputusan tersebut berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Syafie (1992:35) mengutip pendapat Harold Laswell, kebijakan adalah tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi



pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan. Adapun menurut pendapat Harold Laswell (dalam Muchsin dan Fadillah, 2002:23), kebijakan diartikannya sebagai tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan dimasa depan, serta melakukan penelitian dan evaluasi. Sedangkan Easton (2003:176) mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah.

Kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai sifat “paksaan” yang secara potensial sah dilakukan. Sifat memaksa ini tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisasi swasta. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya. Pemahaman ini, pada sebuah kebijakan umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, dalam bentuk Peraturan Daerah misalnya. Sebab, sebuah proses kebijakan tanpa adanya legalisasi dari hukum tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi dari kebijakan publik tersebut. Perlu diperhatikan, kebijakan publik tidaklah sama dengan hukum, walaupun dalam sasaran praktis di lapangan kedua-duanya sulit dipisah-pisahkan.

### **2.2.2. Ciri-Ciri Kebijakan**

David Easton (dalam Wahab 2010:6) mengemukakan bahwa ciri-ciri khusus kebijakan pemerintah bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh apa yang beliau sebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik. Dari penjelasan

Easton di atas membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan, yakni:

1. Kebijakan lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas, tindakan-tindakan yang saling terkait dan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat.
3. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
4. Kebijakan pemerintah mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk yang positif, kebijakan mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuk yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Selanjutnya isi/konten kebijakan terdiri dari

1. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi
2. Jenis manfaat yang bisa dipengaruhi
3. Jangkauan perubahan yang ditetapkan
4. Letak pengambilan keputusan pelaksana-pelaksana program
5. Sumber-sumber yang dapat disediakan.

Berdasarkan poin-poin tersebut maka ciri dari kebijakan adalah kebijakan dihadirkan dalam rangka mewujudkan sebuah tujuan baik yang berbentuk positif maupun negatif yang hakikatnya terdiri atas beberapa tindakan yang saling berkaitan satu sama lain dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.

### **2.2.3. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik**

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (2006:79) adalah sebagai berikut:

#### **2.2.3.1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)**

Penyusunan agenda (*Agenda Setting*) adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam *Agenda Setting* juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*Policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*Policy problem*). *Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

Menurut Dunn (2006:79), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah

tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik di antaranya : telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius, telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak, mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat luas, mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang fashionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi dan keterlibatan stakeholder.

#### **2.2.3.2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)**

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

### **2.2.3.3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*)**

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

### **2.2.3.4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)**

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat di atasi sedini mungkin.

### **2.2.3.5. Penilaian/Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)**

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam

hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

### **2.3 Analisis Kebijakan Publik**

Analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argument untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan (William N. Dunn 2013:225)

#### **2.3.1 Prosedur Analisis Kebijakan Versi Dunn (2013:226)**

##### **2.3.1.1. Perumusan Masalah**

Masalah kebijakan yaitu nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Masalah kebijakan mempunyai ciri-ciri :

- a. Terdapat saling ketergantungan antar masalah kebijakan.
- b. Mempunyai subjektifitas.
- c. Buatan manusia karena merupakan produk penilaian subjektif dari manusia, dan
- d. Bersifat dinamis (Dunn, 2013: 226)

Dan dalam fase-fase perumusan masalah kebijakan Dunn (2013: 226) disusun sebagai berikut :

- a. Pencarian Masalah
- b. Pendefenisian Masalah
- c. Spesifikasi Masalah

#### d. Pengenalan Masalah

Untuk menuju analisis Kebijakan, sejak perumusan masalah sudah sudah harus dikenali model-model kebijakan Dunn (2013:234-241) yaitu:

- a. Model Deskriptif, yaitu model analisis yang bertujuan menjelaskan atau memprediksi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi pilihan kebijakan.
- b. Model Normatif, yaitu model yang selain bertujuan sama dengan model deskriptif, juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pencapaian nilai atau kemanfaatan.
- c. model Verbal, yakni bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi.
- d. Model simbolis, yaitu analisis menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan diantara variabel-variabel kunci yang dipercaya mencari satu masalah.
- e. Model Prosedural, yaitu menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan.
- f. Model sebagai pengganti dan persepektif, yaitu dimensi terakhir yang penting dari model-model kebijakan berhubungan dengan asumsi mereka. Model pengganti (*surrogate model*) diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantive

#### 2.3.1.2 Peramalan Masa depan kebijakan

Menurut Dunn (2013: 291) Peramalan atau Forecasting adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial dimasa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan

terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu Dunn (2013:26). Ramalan memiliki tiga bentuk utama yakni proyeksi, Prediksi, dan perkiraan (Dunn, 2003:291-292).

#### 2.3.1.3. Rekomendasi Kebijakan

Mengutip kembali dari (Dunn, 2013:405) prosedur dari analisis kebijakan dari rekomendasi memungkinkan menghasilkan informasi tentang memungkinkan menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian-serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok atau masyarakat seluruhnya. Untuk membuat rekomendasi kebijakan juga mengharuskan kita menentukan alternatif mana yang paling baik. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuat pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administrasi bagi Implementasi Kebijakan (Dunn, 2013:27).

Membuat rekomendasi kebijakan menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya karena prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral. Rekomendasi pada dasarnya adalah pernyataan advokasi, dan advokasi mempunyai empat pernyataan yang harus dijawab (Dunn, 2013:406), yaitu ;

- a. Dapat ditindaklanjuti, yaitu pernyataan advokatif memusatkan pada tindakan yang dapat menyelesaikan masalah kebijakan
- b. Bersifat prospektif, karena pernyataan tersebut dibuat sebelum melakukan tindakan.



- c. bermuatan nilai, bahwa alternatif bergantung pada "fakta" dan juga pada nilai.
- d. Etik secara kompleks, yaitu nilai-nilai yang mendasari pernyataan advokatif secara etika yang kompleks.

Dalam menentukan sebuah alternatif kebijakan Dunn (2013: 416-417), salah satu pendekatan yang banyak dipergunakan adalah pendekatan rasionalis. Namun, rasionalis juga berarti multirasionalitas, yang berarti terdapat dasar-dasar rasional ganda yang mendasari. Sebagian besar pilihan-pilihan kebijakan yaitu;

- a. Rasionalitas teknis, berkenaan dengan pilihan efektif.
- b. Rasionalitas ekonomis, berkenaan dengan efisiensi.
- c. Rasionalitas legal, berkenaan dengan legalitas.
- d. Rasionalitas sosial, berkenaan dengan ekseptabilitas
- e. Rasionalis substantif, yang merupakan kombinasi keempat rasionalitas diatas.

Karakteristik utama dari berbagai bentuk rasionalitas tersebut adalah bahwa semuanya melakukan pemilihan secara bernalar tentang perlunya mengambil arah tindakan tertentu untuk memecahkan masalah kebijakan. Diluar model rasionalitas diatas, (Dunn, 2003:417) menyarankan rasionalitas komprehensif, yang merupakan upaya yang penyingkronisasi seluruh model rasionalitas diatas. Rasionalitas bertemu dengan realitas bahwa alternatif pada akhirnya terbatas karena adanya nilai-nilai individual yang lebih banyak mempengaruhi dan batas-batas pengetahuan. Menurut Simon dalam Nugroho, (2012:317) memperkenalkan konsep yang lebih modern yaitu *satisfactory* dan *sufficiency*. Disini pengambilan alternatif terbaik maksimal, namun alternatif yang terbukti akan menghasilkan suatu kenaikan manfaat yang paling

memuaskan. Rekomendasi mempunyai enam kriteria Kriteria utama, beberapa tipe pilihan rasional yang dapat diletakan sebagai Kriteria keputusan yang digunakan untuk menyarankan memecahkan masalah kebijakan Dunn (Dunn, 2013:429), yaitu:

- a. Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakan tindakan.
- b. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.
- c. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah.
- d. Perataan, berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
- e. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, referensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
- f. Kelayakan, berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

#### 2.3.1.4. Pemantauan Hasil Kebijakan

Pemantauan hasil kebijakan atau bisa disebut memonitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab akibat kebijakan Publik Dunn (2013:509). Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan yaitu; kepatuhan, akuntansi, pemeriksaan dan eksplanasi Dunn (2013:510).

Dunn (2013:514) membedakan jenis tindakan kebijakan menjadi dua, yakni kebijakan regulatif, yaitu tindakan kebijakan yang dirancang untuk menjamin keputusan terhadap standar prosedur tertentu, dan kebijakan alokatif yaitu tindakan mengalokasikan sumber daya tertentu pada sasaran kebijakan. Baik kebijakan regulatif maupun kebijakan alokatif dapat memberikan akibat yang bersifat distributif ataupun redistributif.

Pemantauan sangat penting dalam analisis kebijakan. Untuk itu ada beberapa penekatan dalam pemantauan yang dapat dipilih menjadi beberapa pendekatan yaitu: akuntansi sistem sosial, eksperimental sosial, auditing sosial, dan sistesis riset praktek, pendekatan tersebut dapat menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif Dunn (2013:519).

#### 2.3.1.5. Evaluasi Kinerja Kebijakan

Evaluasi Kebijakan Publik merupakan bagian dari proses analisis kebijakan. Menurut Dunn (2013:632) fungsi evaluasi dalam analisis kebijakan adalah menyediakan informasi valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, kemudian memberikan kejelasan dan kritik nilai-nilai yang mendasari pilihan tujuan, sasaran, dan penyediaan informasi bagi perumusan masalah dan informasi praktis.

Dunn (2013:612) mengembangkan tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi reoritis. Evaluasi semu adalah “pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi-informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menanyakan tentang manfaat

atau nilai dari hasil-hasil pada target kebijakan.” Evaluasi semu berasumsi bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti sendiri. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil kebijakan, namun mengevaluasi hal tersebut program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan.

Model evaluasi menurut Dunn (2013 :610) sebagai berikut :

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Perataan
- e. Responsivitas
- f. Ketepatan

#### **2.4. Pembelajaran Jarak Jauh**

Konsep dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang lebih dikenal dengan istilah *distance learning* atau *distance education*, yaitu suatu sistem pendidikan di mana terdapat pemisahan antara pengajar dan siswa baik secara ruang dan/atau waktu (Syah, 2020). Pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini sebenarnya tidak mudah dilakukan, berbeda hampir 80 derajat dengan pembelajaran tatap muka (*face to face*). Perbedaan yang paling mendasar tentu siswa tidak bisa melakukan interaksi langsung dengan guru. Sehingga komunikasi yang terjalin sangatlah terbatas. Keterbatasan komunikasi menyebabkan terjadinya pemerolehan informasi dan intruksi dari guru sangatlah terbatas. Memang pembelajaran jarak jauh seyogyanya menitik beratkan pada kemandirian siswa. Kemandirian inilah yang nantinya harus dipupuk di dalam pandemi ini. Tentu pembelajaran ini akan memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya, siswa akan lebih fleksibel dalam belajar, tidak mesti harus

on time, dan tempatnya pun bisa dikondisikan tergantung situasi dan kondisi. Siswa juga akan lebih leluasa menentukan atau mencari sumber belajarnya sendiri bisa mengakses internet. Namun kelemahannya, siswa tidak dapat bersosialisasi dengan siswa lainnya dan gurunya secara nyata, sehingga akan mempengaruhi emosional siswa itu sendiri. Disamping itu, siswa harus bergantung dengan jaringan internet jika pembelajaran jarak jauh yang dilakukan berbasis dalam jaringan internet (daring) (Winaya, 2020).

Pelaksanaan pendidikan pada masa penyebaran virus corona di Indonesia selain berdampak pada pengalihan proses belajar konvensional yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas menjadi proses belajar jarak jauh dimana peserta didik belajar di rumah masing-masing, juga mengharuskan para pendidik menggunakan model asesmen atau penilaian alternatif daripada model penilaian yang biasa dilakukan dalam proses belajar konvensional.

## **2.5. Kerangka Pikir**

Pandemi COVID-19 berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Tak terkecuali aspek pendidikan. Pandemi COVID-19 mengakibatkan proses pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh. Dinas pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan penyuluhan Kebijakan Pencegahan COVID-19 di satuan pendidikan. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan dan meminimalisir angka pasien yang terpapar virus. Dasar dari penyuluhan tersebut adalah:

- 1) Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, dan Nomor 119/4536/SJ Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor

HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

- 2) Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor: B/174/II.01/HK/TUBABA/2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- 3) Surat Edaran Dinas Pendidikan Tulang Bawang Barat Nomor: 420/362/II.01/TUBABA/2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik Baru Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)

SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu dari beberapa sekolah yang mengimplementasikan kebijakan pencegahan COVID-19. Kebijakan pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan memuat Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Peneliti menggunakan teori Efektivitas Menurut Dunn (2006:429) menyatakan bahwa: Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

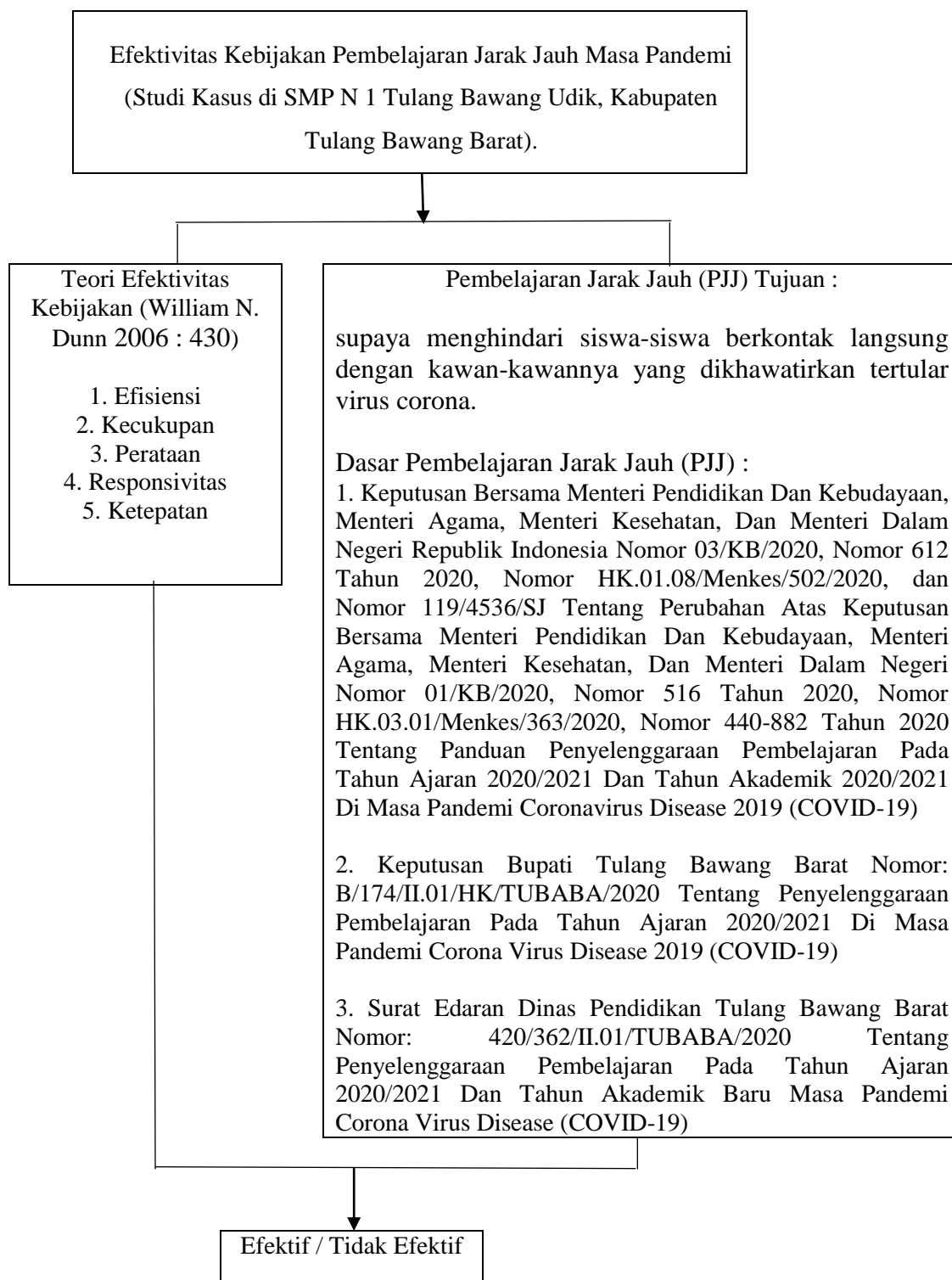
Peneliti menggunakan ukuran efektivitas kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn (2006:430) terdapat lima indikator efektivitas kebijakan, yakni 1. Efisiensi, 2. Kecukupan, 3. Perataan, 4. Responsivitas, 5. Ketepatan, efisiensi akan terlaksana jika penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan organisasi diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Kecukupan, dengan melihat atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam

menyelesaikan masalah yang terjadi. Perataan, Perataan atau adil haruslah bersifat merata dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Responsivitas, respon dari suatu aktivitas dalam sebuah kebijakan publik. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Ketepatan, ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Penggunaan teori ini karena indikator yang ada sesuai dengan fokus dalam penelitian ini untuk mengukur Efektivitas Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi (Studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Berdasarkan uraian tersebut agar lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan kerangka pikir di bawah ini :

**Gambar 2. Kerangka Pikir**





*Sumber : Diolah oleh peneliti.*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomenal. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan untuk membangun hipotesis dan teori (Moleong, 2006: 151).

Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti akan menggambarkan bagaimana Efektivitas Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi (Studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat).

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena SMP N 1 Tulang Bawang Udik merupakan sekolah yang

berakreditasi A, artinya merupakan sekolah SMP yang menjadi teladan atau sekolah favorit. Adanya kasus siswa di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terpapar COVID-19 maka peneliti memilih SMP N 1 Tulang Bawang Udik sebagai lokasi penelitian, peneliti ingin melihat seberapa efektif kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di SMP N 1 Tulang Bawang Udik dalam upaya pencegahan penularan COVID-19.

### **3.3. Fokus Penelitian**

Masalah pada penelitian bertumpu pada sebuah fokus. Fokus penelitian merupakan batas masalah yang ada di dalam penelitian kualitatif, dimana fokus ini berisikan tentang pokok masalah yang sifatnya umum. Adanya fokus di dalam penelitian dengan metode kualitatif sangatlah penting, dikarenakan dengan adanya fokus penelitian ini kita dapat membatasi apa saja yang diteliti dan dapat mengarahkan pelaksanaan penelitian. Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini difokuskan pada efektivitas kebijakan dengan ukuran efektivitas yang dikembangkan oleh William N. Dunn (2006:430) terdapat lima indikator efektivitas kebijakan, yakni:

#### 1) Efisiensi

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi (studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat) telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

#### 2) Kecukupan

Melihat atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi (studi di SMP N 1

Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat) disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

### 3) Perataan

Kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu kebijakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi (studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat) mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

### 4) Responsivitas

Seberapa jauh suatu kebijakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi (studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat) dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok di satuan pendidikan.

### 5) Ketepatan

Ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi (studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat) lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

## **3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

### **3.4.1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara menggali dari sumber informasi (informan) dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa:

- a) Data hasil wawancara mengenai kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pembelajaran jarak jauh
- b) Data observasi SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pada penelitian ini, informan-informan dipilih dengan mendasar pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data serta bersedia memberikan informasi data yang berasal dari SMP N 1 Tulang Bawang Udik dan Dinas Pendidikan, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

### **3.4.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya hasil dari wawancara mendalam yang telah dilakukan maupun mengecek kembali data yang sudah ada sebelumnya (Sugiyono, 2010:78).

Data tersebut bersumber dari dokumentasi berupa surat kabar, buku, situs internet yang berhubungan dengan efektivitas kebijakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu berupa:

- a) Data Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh yaitu:
  - 1) Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor: B/174/II.01/HK/TUBABA/2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  - 2) Surat Edaran Dinas Pendidikan Tulang Bawang Barat Nomor: 420/362/II.01/TUBABA/2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik Baru Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)

- b) Dokumentasi SMP N 1 Tulang Bawang Udik di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- c) Data gambaran umum Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- d) Data sejarah berdirinya SMP N 1 Tulang Bawang Udik
- e) Data perubahan nama sekolah

### 3.5. Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, informasi merupakan data yang diperoleh di lokasi penelitian, dalam naskah atau dokumen, dan dari informan yang telah ditunjuk sebagai kunci pengayaan sumber data. Peneliti akan menggunakan informan untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* (Moleong, 2006:151).

Teknik *purposive sampling* yaitu cara pengambilan subjek penelitian bukan berdasarkan strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu atau dengan pertimbangan tertentu (Moleong, 2006:151).

Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti menetapkan beberapa informan yaitu:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Kepala Sekolah SMP N 1 Tulang Bawang Udik
3. Guru Sekolah SMP N 1 Tulang Bawang Udik
4. Kabid pendidikan dasar dan SMP
5. Orang Tua
6. Siswa

**Tabel 2. Daftar Informan**

No.	Informan	Nama	Waktu Wawancara
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang	Budiman Jaya	22 Maret 2021 ( 10 : 54 WIB )

	Bawang Barat		
2.	Kabid pendidikan dasar dan SMP	Qodhi Putra Bujung	19 Maret 2021 ( 09 : 47 WIB )
3.	Kepala Sekolah SMP N 1 Tulang Bawang Udik Guru Sekolah SMP N 1 Tulang Bawang Udik	Kasiyan	1 Maret 2021 ( 10 : 26 WIB )
4.	Guru Sekolah SMP N 1 Tulang Bawang Udik	R. Eko Yuli Kristianto	5 Maret 2021 ( 09 : 02 WIB )
5.	Orang Tua	Okta Riana	30 Maret 2021 ( 11 : 58 WIB )
6.	Siswa	Naftali Leota Aradisa	8 Maret 2021 ( 09 : 40 WIB )

Sumber : Diolah oleh peneliti

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2006:151) untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan pribadi dan untuk memperoleh informasi lengkap dengan informan dengan lisan maupun tulisan secara langsung dengan bertatap muka dengan informan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dari sumber-sumber data dokumentasi yang belum dipahami oleh penelitian serta untuk memperoleh pengertian maupun penjelasan yang lebih mendalam tentang realita dan obyek yang akan diteliti tersebut

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, dalam penggunaannya lebih fleksibel dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana informan yang diajak wawancara diminta pendapat untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## 2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi diartikan sebagai pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh.

### **3.7. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan Moleong (2006:151) meliputi:

#### 1. Editing

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat segera diproses lebih lanjut. Tahapan Editing yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi mengenai efektivitas kebijakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi di Kabupaten Tulang Bawang Barat

#### 2. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan mengenai mengenai struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi dalam kebijakan pembelajaran jarak jauh.



### 3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen yang dikutip Moleong (2006:152) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data merupakan cara seseorang peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, karena data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat digunakan begitu saja, analisis

Prosedur analisis data kualitatif dibagi dalam lima langkah Afifuddin (2012: 159) yaitu:

1. Mengorganisasi data. Cara ini dilakukan dengan membaca berulang-ulang data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai.
2. Membuat kategori, menentukan tema, dan pola. Dalam hal ini, peneliti menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu kategori dengan masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.
3. Mencari eksplanasi alternatif data proses berikutnya ialah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut dengan didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.
4. Menulis laporan. Penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini, peneliti harus mampu menuliskan data, frase dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.

Analisis data merupakan cara seorang peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, analisis data menjadi bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat lebih berarti dan bermakna dalam memecahkan masalah penelitian.

### **3.9. Verifikasi Data/Kesimpulan**

Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis data. Data yang sudah di uji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna, dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah menggunakan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data. Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan teori yang peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian ini. Peneliti kemudian menarik kesimpulan dari hasil data yang telah direduksi dan ditampilkan.

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan, menunjukkan bahwa Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi (Studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat) efektif. Hal tersebut ditandai dengan terpenuhi nilai-nilai efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan. Terdapat 3 nilai yang terpenuhi pertama kecukupan, kedua pemerataan dan ketiga ketepatan. Pertama kecukupan, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat telah berupaya secara maksimal dalam menerapkan Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat), adanya pemberian paket data internet dari pemerintah pusat dan fasilitas wifi dari sekolah untuk siswa-siswa kalau diperlukan untuk pembelajaran serta sekolah telah menerapkan pedoman penyelenggaraan pembelajaran pada Tahun Akademik Baru Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dari Dinas Pendidikan dirasa sudah cukup memperlihatkan kebijakan pemerintah dalam menerapkan Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi.

Kedua pemerataan, pelaksanaan Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi sudah berdasarkan pada asas adil dan merata khususnya bagi sekolah SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat). Ketiga ketepatan, kebijakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat) ini sudah tepat agar mencegah penularan virus covid-19 sehingga proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan tetap berjalan dengan semestinya walaupun dalam

keadaan yang sedang kacau. Namun terdapat 2 nilai yang belum terpenuhi pertama efisiensi dan kedua responsivitas. Pertama efisiensi, kebijakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi (Studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat) tidak efisien karena biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan. Kedua responsivitas, adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat) mendapatkan tanggapan yang negatif dari siswa khususnya bagi sekolah SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat).

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat diberikan saran:

1. Kebijakan pembelajaran jarak jauh telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perlu adanya perbaikan perumusan kebijakan terkait kebijakan yang layak untuk dilaksanakan agar dunia pendidikan tetap berjalan walau dalam keadaan pandemi.
2. Mendapatkan tanggapan yang negatif dari siswa khususnya bagi sekolah SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait banyaknya kendala-kendala yang dialami oleh siswa, khususnya siswa yang tidak mempunyai HP android, dihimbau kepada orang tua siswa dapat semaksimal mungkin memberikan fasilitas kepada siswanya.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, I. F. (2020). Asesmen Alternatif Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) Di Indonesia. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.33650/pjp.v7i1.1136>

Baharin, R., Syah, R., Yussof, I., & Saukani, N. M. (2020). Impact of Human Resource Investment on Labor Productivity in Indonesia. *Iranian Journal of Management Studies*.

BNPB (2020) Situasi virus corona (COVID-19) Indonesia.  
<https://www.covid19.go.id> Diakses pada 8 Oktober 2020 pukul 22:35

Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.

Dinkes.lampungprov. (2020). Infografis Update Situasi COVID-19 Provinsi Lampung 13 September 2020 Pukul 10.00.  
<https://dinkes.lampungprov.go.id/infografis-update-situasi-covid-19-provinsi-lampung-13-september-2020-pukul-10-00/> Diakses pada 3 Oktober 2020 pukul 19:14

Dinkes.lampungprov, (2020). Data Pemantauan COVID-19 Provinsi Lampung.  
<https://dinkes.lampungprov.go.id/peta-covid19-2/> Diakses pada 8 Oktober 2020 pukul 21:33

Dunn, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Dunn, 2013, *Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Dwi, B., Amelia, A., Hasanah, U., & Putra, A. M. (2020). Analisis Keefektifan

Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*.

Easton, David. 2003. *The Political System: An Inquiry into the State of Political*. (alih bahasa), Kerangka Kerja Analisa Sistem. Politik. Jakarta: Bina Pustaka.

Kadji, Yulianto (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Kuota untuk Pembelajaran Daring Pelajar dan Mahasiswa Disubsidi Pemerintah Hingga Desember 2020  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kuota-untuk-pembelajaran-daring-pelajar-dan-mahasiswa-disubsidi-pemerintah-hingga-desember-2020/> Diakses pada 14 Oktober 2021 pukul 20:44

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid- 1 9)”, 2020, Indonesia

Muchsin, H. dan Fadillah, P. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019Ncov), Diterbitkan Oleh Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Sub Direktorat Penyakit Infeksi Emerging.

Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disesase (COVID-19), Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), 17 Pebruari 2020.

Rawls, 1971, *A Theory of Justice*. Cambridge, Mass. Harvard University. Press. London

Rektor ITB: Atmosfer Akademik Tidak Bisa Tercapai dengan Pembelajaran Jarak Jauh  
<https://tekno.tempo.co/read/1514793/rektor-itb-atmosfer-akademik-tidak-bisa-tercapai-dengan-pembelajaran-jarak-jauh> Diakses pada 17 Oktober 2021

Sirait, Alfonsus. 1991. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung.

Surat Edaran Bupati Tulangbawang Barat Nomor : 443/01/II.01/TUBABA/2020 Tentang Upaya Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19)  
<https://warta9.com/corona-mewabah-bupati-umar-liburkan-sekolah/> Diakses pada 2 September 2020 pukul 19:46

Syafie, Inu Kencana. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Eresco.

Syah, R. H. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314>

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2005. *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. JogJakarta: Lukman Offset.

The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) in China. (2020). *Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi = Zhonghua Liuxingbingxue Zazhi*. <https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2020.02.003>

Wahab, 2010, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.

- Widodo, Joko. 2001. *Implementasi Kebijakan*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Wiratmo, L. B. (2020). Sosialisasi Pemutusan Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*.
- Yoga Purandina, I. P., & Astra Winaya, I. M. (2020). Pendidikan Karakter di Lingkungan Keluarga Selama Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi COVID-19. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*.  
<https://doi.org/10.37329/cetta.v3i2.454>
- Yuliana. (2020). Corona virus diseases (Covid -19); Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*.
- Yurianto, A. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). In *Germas*.